

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KEPADA MASYARAKAT DI PT. BANK MANDIRI**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

FA'IS BAYU WICAKSONO

C100140066

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KEPADA MASYARAKAT DI PT.BANK MANDIRI**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :

FA'IS BAYU WICAKSONO

C 100 140 066

Telah diperiksa dan disetujui untuk di uji oleh:

Dosen Pembimbing



(Inayah, S.H., M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)
KEPADA MASYARAKAT DI PT.BANK MANDIRI**

Oleh:

FA'IS BAYU WICAKSONO
C100140066

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari, Sabtu 18 Agustus 2018
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Inayah S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.H)
NIK. 537 / NIDN.072708503

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan.

Surakarta, 14 Agustus 2018

Penulis,



FA'IS BAYU WICAKSONO
C100140066

TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA MASYARAKAT DI PT. BANK MANDIRI

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat Mikro dan dampak pemberian Kredit Usaha Rakyat dalam memajukan produktivitas usaha mikro, serta untuk mengetahui upaya hukum terhadap debitur yang mengalami kredit bermasalah. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (non doktrinal) dengan sifat penelitian deskriptif. Sumber data meliputi data primer yaitu wawancara dan data sekunder meliputi sumber hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemberian kredit tetap mengacu pada mekanisme sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Pemberian kredit usaha rakyat dapat membantu memajukan produktivitas usaha para debitur pengguna Kredit Usaha Rakyat sesuai dengan tujuan diadakannya program Kredit Usaha Rakyat. Upaya hukum dalam mengatasi kredit bermasalah yaitu melakukan penagihan secara terus-menerus dengan Account Office datang kerumah debitur untuk membicarakan secara kekeluargaan atau lebih bersifat persuasif, melalui surat atau penagihan secara tertulis dan penagihan melalui tim.

Kata kunci: *pemberian kredit, dampak, tanggung jawab hukum*

Abstract

This study aims to determine the process of granting Micro People's Business Credit and the impact of providing People's Business Credit in advancing micro business productivity, as well as to find out legal efforts against debtors who experience non-performing loans. The research method uses an empirical (non-doctrinal) juridical approach method with the nature of descriptive research. Data sources include primary data is interviews and secondary data including primary and secondary legal sources. Data collection methods with library studies and interviews. Data analysis techniques use qualitative. The results of the research show that the credit granting process still refers to the mechanism in accordance with the applicable regulations and still prioritizes the principle of prudence. Public business credit can help advance business productivity of debtors who use People's Business Credit in accordance with the purpose of the People's Business Credit program. Legal efforts in dealing with non-performing loans are to carry out continuous billing with the Account Office to come home to the debtor to discuss in a family or persuasive manner, through letters or written billing and billing through the team.

Keywords: *credit provision, impact, legal responsibility*

1. PENDAHULUAN

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan yang salah satunya adalah lembaga perbankan. Lembaga keuangan yang masuk dalam sistem perbankan yaitu lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.¹ Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri maupun dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga .²

Di indonesia lembaga keuangan bank memiliki misi dan fungsi yang khusus. Perbankan indonesia selain memiliki fungsi yang lazim juga memiliki fungsi yang diarahkan sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Peran perbankan tidak hanya dalam bentuk pendanaan melalui skema – skema khusus bersuku bunga murah dan dengan berbagai kemudahan khusus, tetapi juga sekaligus memberi pembinaan, misalya didalam desain, proses produksi dan pemasaran bagi UMKM yang mendapatkan kredit bank.

Peraturan menteri koordinator bidang perekonomian republik indonesia selaku ketua komite kebijakan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah nomor 11 tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat (KUR) . pelaksanaan KUR untuk Usaha Mikro Kecil dan menengah tanpa menggunakan jaminan di berikan dengan plafon maksimal Rp. 25.000.000. Perbankan yang

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi usman. 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika Jakarta, Hal 39.

² Muhammad djumaha, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hal 106.

³ Muhammad Djumaha, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hal 110

dapat melaksanakan program KUR Mikro adalah yang mempunyai Non Performing Loan (NPL) di bawah 5% selama tiga bulan berturut-turut. Sedangkan perbankan yang memiliki Non Performing Loan (NPL) di atas 5% selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut tidak dapat melaksanakan program kredit usaha rakyat (KUR) Mikro.⁴

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Mandiri?, (2) Apakah pemberian kredit usaha rakyat (KUR) dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM?, (3) Apa permasalahan hukum yang timbul dari pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Mandiri dan bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasinya?

Penelitian ini mempunyai tujuan: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Mandiri. (2) Untuk mengetahui apakah pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Mandiri dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM. (3) Untuk mengetahui upaya hukum debitur yang mengalami kredit bermasalah dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di Bank Mandiri.

2. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana dalam metode pendekatan ini menekankan penelitian pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam lingkup masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi di PT. Bank Mandiri cabang Boyolali. Pengambilan lokasi ini dikarenakan PT. Bank Mandiri merupakan salah satu perusahaan BUMN di bidang perbankan yang memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada masyarakat.

⁴ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro, 2017.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di PT. Bank Mandiri

Proses pemberian Kredit Usaha Rakyat dilakukan secara bertahap yaitu sebagai berikut :

Tahap Permohonan Kredit yang berupa Pengajuan Permohonan Kredit Usaha Rakyat dilakukan tertulis secara individual oleh calon debitur kepada pihak Bank Mandiri. Calon debitur Kredit Usaha Rakyat datang ke kantor Bank Mandiri cabang boyolali dibantu oleh customer service, kemudian calon debitur KUR mengisi formulir pengajuan Kredit Usaha Rakyat yang sudah disediakan pihak Bank dan ditandatangani oleh pemohon.⁵ Selanjutnya debitur diminta untuk melengkapi syarat-syarat administrasi yaitu Form permohonan kredit, KTP Debitur, KK (Kartu Keluarga), Surat Nikah / Cerai (bagi yang telah menikah/cerai), Pas photo terbaru Calon Debitur, Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diterbitkan Pemerintah Daerah setempat dan/atau surat ijin lainnya antara lain seperti Surat Keterangan Usaha/ Surat Keterangan Domisili Usaha, Surat keterangan Lunas/Roya dan cetakan rekening dari pinjaman kredit produktif sebelumnya (jika di SID BI masih tercatat memiliki baki debet kredit produktif, namun debitur menyatakan telah lunas).

Selanjutnya yang dilakukan adalah tahap analisis kredit. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, analisis kredit harus dibuat secara lengkap, akurat dan objective berdasarkan bentuk, format, dan kedalaman analisis kredit ditetapkan oleh bank yang disesuaikan dengan jumlah dan jenis kredit. Dalam memberikan pelayanan KUR Mikro, analisis kredit sekurangnya harus mencakup penilaian tentang prinsip 5C dengan tujuan untuk melindungi bank atas resiko yang mungkin timbul.⁶ selanjutnya tahap terakhir dalam pemberian KUR ialah tahap pencairan yaitu pencairan dari apa yang dimintakan debitur setelah melalui proses-proses tersebut.

⁵ Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Boyolali pada hari Senin, jam 10.00 tanggal 2 April 2018.

⁶ Wawancara dengan Account Office Bank Mandiri Cabang Boyolali pada hari Selasa jam 13.00 tanggal 3 April 2018.

3.2 Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro dapat membantu perekonomian masyarakat pelaku UMKM

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. Pada dasarnya Kredit Usaha Rakyat adalah Program Pemerintah dengan adanya fasilitas penjaminan dalam rangka meningkatkan UMKM pada sumber pembiayaan sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian.

Masyarakat perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi meningkatkan kesejahteraannya, dalam kenyataannya tidak semua masyarakat terutama golongan masyarakat lapisan menengah ke bawah yang tidak memiliki modal cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktifitasnya sehingga dalam hal ini perlu bagi mereka membutuhkan suatu bantuan yang berupa pinjaman atau kredit. Kredit dibutuhkan oleh masyarakat baik oleh perorangan maupun badan usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya ataupun untuk meningkatkan kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dikarenakan UMKM merupakan suatu bentuk kegiatan usaha yang paling banyak terdapat ditengah masyarakat, sehingga jika bank lebih memperhatikan dan memberikan kemudahan dalam pemberian kredit kepada UMKM dan koperasi maka jika usaha ini bisa semakin tumbuh dan berkembang maka pendapatan orang per orang dari koperasi dan UMKM juga akan terus meningkat dan taraf hidup rakyatpun akan meningkat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis secara langsung kepada debitur KUR Mikro Bank Mandiri cabang boyolali bahwa pemberian KUR mikro Bank Mandiri cabang boyolali dari awal januari 2018 sampai akhir maret 2018 sudah mencapai 25 debitur yang menggunakan program Kredit Usaha Rakyat dimana 3 debitur mengalami angsuran perbulan tidak tepat/terlambat, 2 debitur telah mengalami wanprestasi dan 20 debitur lainnya telah melakukan kredit dengan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah diperjanjikan. dalam hal ini

dapat penulis simpulkan dengan adanya program pemerintah memberikan fasilitas pembiayaan kredit usaha rakyat ini sangat membantu masyarakat dalam menambah modal dalam mengembangkan usahanya agar kehidupannya semakin baik dan tentunya lebih sejahtera. Dengan adanya program KUR Mikro ini tentu sangat membantu dalam pengembangan usaha yang dijalankan masyarakat pelaku UMKM.

3.3 Permasalahan dan Upaya Hukum dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat di Bank Mandiri

Setiap hubungan hukum tidak selamanya berjalan lancar tetapi adakalanya timbul permasalahan, tidak terkecuali perjanjian KUR Mikro Bank Mandiri cabang boyolali dengan debiturnya. Dalam hal ini, masalah yang timbul dalam pelaksanaan KUR Mikro adalah kredit bermasalah. kredit dikatakan selesai apabila telah selesai masa/jangka waktu pembayaran kredit yang sudah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini apabila debitur lalai/kredit mengalami macet, maka pada dasarnya kreditur pemegang jaminan kebendanaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur dalam kelalaiannya menjalankan kewajiban atau biasa disebut wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur ini melihat pada Undang-undang fidusia pasal 15 ayat 3 yang bunyinya “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.

Namun, terdapat upaya lain sebelum dilakukan upaya hukum seperti eksekusi jaminan yaitu upaya administrasi. Menurut H.R Daeng Naja dalam bukunya halaman 370, penyelesaian kredit bermasalah dapat dilakukan dengan cara administrasi terlebih dahulu, antara lain :

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak.

2. Penataan kembali (*restructuring*)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.

3. Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat mikro di Bank Mandiri cabang boyolali sudah sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata yaitu :

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
2. Adanya kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dengan ditunjukkannya syarat-syarat administrasi
3. Adanya suatu obyek
4. Adanya kausa yang halal

Maka kedua belah belah pihak telah terjadi kesepakatan yang sah sesuai dengan apa yang ada di aturan perundang-undangan.

Kedua, pemberian kredit usaha rakyat dapat membantu perekonomian pelaku UMKM. Dari 25 debitur hanya terdapat 5 debitur saja yang mengalami kredit bermasalah dan 20 debitur lainnya sudah mentaati peraturan sesuai perjanjian kedua belah pihak dan menggunakan kredit usaha rakyat mikro sesuai dengan tujuannya yaitu digunakan untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan ditunjukan peningkatan produksi dan pemasaran usaha masyarakat pelaku UMKM tersebut karenanya, pemberian kredit usaha rakyat mikro di Bank Mandiri sangat membantu meningkatkan perekonomian

masyarakat pelaku UMKM sesuai dengan program pemerintah mengenai peningkatan usaha kecil dan menengah melalui program KUR Mikro ini.

Ketiga, permasalahan yang timbul dan upaya hukum untuk mengatasinya. Dalam hal eksekusi jaminan dilakukan pihak bank apabila debitur tidak melakukan angsuran sama sekali dan tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perjanjian awal. Dimana pihak bank memberikan pilihan terlebih dahulu dengan mengembalikan jaminan kepada debitur untuk dijual debitur dengan tujuan membayar sisa angsuran atau dilelang oleh pihak bank apabila dari pihak debitur tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perjanjian dan apabila sampai pada pengadilan maka pihak bank tetap mengacu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Fidusia pasal 15 ayat 3 yang berbunyi “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaanya sendiri”.

4.2 Saran

1. Untuk pemberdayaan UMKM dalam proses pemberian kredit usaha rakyat di Bank Mandiri sebaiknya dilakukan peninjauan kembali mengenai syarat yang terlalu memberatkan dan analisis kredit sehingga tidak menyulitkan calon debitur dalam peminjaman KUR mikro untuk meningkatkan perekonomiannya dalam usaha kecil dan menengah.
2. Dalam program kredit usaha rakyat mikro pemerintah diharapkan menurunkan kembali tingkat bunga KUR karena program ini ada untuk memudahkan masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah.
3. Selain melalui sistem kekeluargaan dalam penyelesaian kredit bermasalah sebaiknya pihak bank lebih aktif lagi dalam mengedepankan penyelesaian secara sistem win-win solution yaitu saling memuaskan antara pihak kreditur dan pihak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman. 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika Jakarta, Hal 39.
- Djumaha, Muhammad, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hal 106.

_____, 2006, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, hal 110

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Mikro, 2017.

Wawancara dengan Account Office Bank Mandiri Cabang Boyolali pada hari Selasa jam 13.00 tanggal 3 april 2018.

Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Mandiri Cabang Boyolali Pada Hari Senin jam 10.00 tanggal 2 april 2018.